

**KOLABORATIF PERGURUAN TINGGI DALAM PENGEMBANGAN UMKM DI
KECAMATAN PANCORAN, JAKARTA SELATAN**

***HIGH SCHOOL COLLABORATION IN THE DEVELOPMENT OF MSMEs IN
PANCORAN DISTRICT, JAKARTA SELATAN***

Heri Sasono^{1*}, Herlina²

¹ STIE Dharma Bumiputera, Jakarta

² STIE Dharma Bumiputera, Jakarta

*Email korespondensi : heribtc@yahoo.co.id

Article History:

Received: 20 Januari 2021

Revised: 02 Februari 2021

Accepted: 26 Februari 2021

Keywords: *Collaboration, Higher Education (PT), Integrated Entrepreneurship Development (PKT) and the 7P Concept*

Abstract: *Improving integrated entrepreneurship (PKT) for the DKI Jakarta Provincial Government, by utilizing the potential, expertise and facilities of MSME actors by increasing cooperation between universities (PT) and increasing Government programs in implementing the Tridharma of Higher Education. This research is a qualitative research, because the problems are complex, dynamic and full of meaning to see the implementation and results of Inter-University Cooperation (PT) in MSME Development in Pancoran District, South Jakarta. The benefits of collaborative integrated entrepreneurship development (PKT) include the 7P concepts, namely: (a). registration, (b). training, (c). assistance, (d). licensing, (e). Marketing, (f), reporting and (g). capital. The DKI Provincial Government is optimistic that the target is to reach 200,000 entrepreneurs by 2022, where the process of achieving the 7 P concept is carried out in stages through collaboration with several universities in LLDikti Region 3, Jakarta.*

Abstrak

Peningkatan kewirausahaan terpadu (PKT) Pemerintah Provinsi DKI, Jakarta, dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki para pelaku UMKM dengan meningkatkan kolaboratif antara Perguruan Tinggi (PT) dengan peningkatan program Pemerintah dalam menerapkan tridarma Perguruan Tinggi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, karena permasalahannya kompleks, dinamis dan penuh makna untuk melihat pelaksanaan dan hasil Kolaboratif Antara Perguruan Tinggi (PT) dalam Pengembangan UMKM di Kecamatan Pancoran,

Jakarta Selatan.

Manfaat dari kolaboratif pengembangan kewirausahaan terpadu (PKT) mencakup konsep 7P, yaitu : (a). pendaftaran, (b). pelatihan, (c). pendampingan, (d). perizinan, (e). Pemasaran, (f), pelaporan dan (g). permodalan. Pemprov DKI optimistis, bahwa target pencapaian 200.000 wirausaha pada tahun 2022, dimana proses pencapaiannya dalam konsep 7 P secara bertahap melalui kolaboratif dengan beberapa Perguruan Tinggi di LLDikti Wilayah 3, Jakarta.

Kata Kunci: Kolaboratif, Perguruan Tinggi (PT), Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) dan Konsep 7P

PENDAHULUAN

Kewirausahaan menjadi skala prioritas yang diunggulkan di negara, karena dapat meningkatkan dan menggerakkan perekonomian. Pembinaan Kewirausahaan melalui pendidikan dan pelatihan dengan kerjasama atau kolaborasi antara Perguruan Tinggi dalam pengembangan kewirausahaan terpadu (PKT) adalah kegiatan yang dilakukan dalam pengembangan potensi ketrampilan dan kemandirian berusaha dengan cara kolaboratif antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dunia pendidikan (PT), dunia usaha dan masyarakat dan/atau lembaga dan/atau pihak lainnya (Pergub No. 2 Tahun 2020).

UMKM (Usaha Kecil dan Menengah) adalah aktivitas usaha yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha milik perorangan. Perbedaannya dengan usaha besar dapat dilihat dari jumlah kekayaan bersih pelaku usaha dan hasil penjualan tahunan. UMKM dapat dikelompokkan menjadi ; (a). Kuliner, (b). Fashion, (c). Pendidikan, (d). Bisnis Otomotif (e). Agobisnis, (f). Tour & Travel (g). Produk Kreatif, (h). Teknologi Internet, (i). Bisnis Kecantikan (j). Event Organizer, (k). Jasa Kebersihan dan (l). Kebutuuh Anak.

Jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah pada 2018 lalu telah mencapai 58,87 juta orang. Pelaku usaha mikro adalah yang paling banyak, berdasarkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik, dan United Nation Population Fund. Pelaku usaha mikro ini cukup besar, artinya, jumlah pelaku UKM di Indonesia tergolong sangat banyak. Meskipun masih dalam taraf mikro, kehadiran UKM menjadi salah satu penggerak roda perekonomian secara global di Indonesia, terhadap sekitar 265 juta jiwa.

Rasio UMKM yang masih relatif kecil ini, disebabkan oleh keterbatasan modal, banyak pelaku usaha yang memulai bisnis dari kecil. Pengelolaan seadanya dan keahlian terbatas membuat laju pertumbuhan UKM biasanya tidak terlalu cepat. Namun, bisnis UKM menjadi pilihan masyarakat untuk keluar dari situasi ekonomi berat, karena pelaku usaha memiliki penghasilan baru yang bisa disisihkan untuk membeli kebutuhan keluarga (rumah tangga).

Tujuan PKT adalah (a). menumbuh kembangkan potensi kewirausahaan dengan mendorong dan memfasilitasi penciptaan wirausaha di Pemprov DKI. (b). meningkatkan kualitas dan pendayagunaan sumber daya sebagai wirausaha melalui pemanfaatan teknologi dan sumber daya lokal agar memiliki keunggulan kompetitif bagi penguatan ekonomi Pemprov DKI (c). mengurangi pengangguran dan kemiskinan melalui peningkatan kesempatan berwirausaha (d). meningkatkan jumlah wirausaha yang mandiri, berkualitas, tangguh dan handal melalui pengembangan skala usaha produktif, baik yang dikelola perorangan maupun kelompok dalam bentuk koperasi, UMKM dan IKM (e). meningkatkan produktifitas dan daya saing UMKM dan IKM dalam menopang pertumbuhan dan pemerataan ekonomi (f). mengarahkan kebijakan dan dukungan para pemangku kepentingan untuk mewujudkan kewirausahaan terpadu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pemprov DKI.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, karena permasalahannya kompleks, dinamis dan penuh makna, penelitian ini dirancang untuk melihat pelaksanaan dan hasil Kolaboratif Antara Perguruan Tinggi (PT) dalam Pengembangan UMKM di Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan.

Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah para UMKM di Jakarta Selatan, Khususnya Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan.

UKMK yang dijadikan obyek pebelitian adalah UMKM yang bergerak di bidang Warung sembako, frozen food dan buah, kue kering & basah, makanan ringan, kuliner, jasa pembuah pot & keranjang parcel, warung jajanan, mie ayam dan lain-lain.

SumberData

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

(1). Data Primer.

Menurut Sugiyono (2018:67) menjelaskan bahwa data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer di dapat dari sumber informan perseorangan seperti hasil wawancara dan observasi.

(2). Data Sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan peneliti dari sumber-sumber yang telah ada (Sugiyono, 2018:68). Data sekunder diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dokumen-dokumen dan lain sebagainya.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data, maka peneliti akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang di tetapkan (Nasir, 2018:174). Lebih lanjut Emzir (2015:37) menjelaskan bahwa, pengumpulan data berdasarkan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi berupa dokumen pribadi dan resmi, foto, rekaman, gambar, dan percakapan informal merupakan sumber data kualitatif.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dengan pengumpulan data dan setelah data dikumpulkan, peneliti melakukan analisis terhadap jawaban atau data yang ada sampai memenuhi kriteria yang disyaratkan.

HASIL SURVEY LAPANGAN

Merujuk Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota DKI Jakarta, dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dharma Bumiputera, Jakarta, tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT). Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dharma Bumiputera, Jakarta dan beberapa Universitas di Wilayah LLDikti Wilayah 3, Jakarta untuk memberikan pendampingan, pembinaan dan pelatihan, kepada para UMKM, agar dapat maju dan berkembang serta tetap survive di Era pandemi Covid 19 yang melanda Indonesia dan hampir semua negara di Dunia.

Selama Pandemi Covid 19, agar para UMKM di Indonesia, khususnya di Pemprov DKI Jakarta, maka Disperindagkop dan UKM Pemprov DKI Jakarta untuk membantu para UMKM diberikan bantuan dana atau modal usaha kepada para pelaku UMKM di Pemprov DKI Jakarta.

Hasil penelitian data UMKM di Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan yang telah berhasil dikumpulkan oleh STIE Dharma Bumiputera, Jakarta, sebanyak 216 UMKM.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UKM atau UMKM dibagi atas 3 kelompok, yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Adapun kriteria dari ketiganya, sebagai berikut:

1. Usaha Mikro

Usaha mikro adalah usaha yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha milik perorangan. Kriteria usaha mikro adalah memiliki kekayaan bersih maksimal Rp50.000.000 selain tanah dan bangunan. Kriteria lain adalah hasil penjualan tahunan tak melebihi Rp300.000.000.

2. Usaha Kecil

Usaha kecil adalah usaha yang berdiri sendiri dan dimiliki oleh perorangan atau badan usaha. Usaha ini bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan dari usaha menengah atau usaha besar. Kekayaan bersih pelaku usaha kecil adalah antara Rp50.000.000 hingga Rp500.000.000, selain tanah dan bangunan tempat usaha. Hasil penjualan adalah antara Rp300.000.000 hingga Rp2.500.000.000 per tahun.

3. Usaha Menengah

Usaha menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri. Usaha ini dimiliki orang perorangan atau badan usaha, tetapi bukan anak perusahaan besar atau cabang perusahaan besar.

Jumlah kekayaan bersih pelaku usaha menengah adalah antara Rp500.000.000 hingga Rp10.000.000.000. Angka ini tidak termasuk tanah dan bangunan usaha. Selain itu, jumlah penjualan adalah Rp50.000.000.000 per tahun.

UMKM Yang Terdata Oleh STIE Dharma Bumiputera di Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan

No	Jenis Usaha	Jumlah UMKM	%
1	Kuliner	55	25,46
2	Fashion	38	17,59
3	Pendidikan	6	2,78
4	Bisnis Otomotif	12	5,56
5	Agrobisnis	21	9,72
6	Tour & Travel	12	5,56
7	Produk Kreatif	22	10,19
8	Teknologi Internet	21	9,72
9	Bisnis Kecantikan	11	5,09
10	Event Organizer	4	1,85

12	Jasa Kebersihan	8	3,70
12	Kebutuhan Anak	6	2,78
	Total	216	100,00

Sumber : UMKM Kecamatan Pancoran, Jaksel

Data UMKM yang tercatat terbanyak 216 pelaku usaha, terbesar adalah usaha kuliner sebanyak 25,46%, diikuti oleh usaha fashion (pakaian) sebanyak 17,59 % dan terkecil adalah usaha event organizer sebanyak 1,85% dan usaha kebutuhan anak sebanyak 2,78%.

UMKM Pemprov DKI Jakarta

Tahun	Jumlah UMKM	Pertumbuhan (%)
2014	1.336	-
2015	1.548	15,87
2016	1.925	24,35
2017	2.352	22,18
2018	2.860	21,60
2019	3.418	19,51
2020	4.058	18,72

Sumber : Pemrov DKI Jakarta

Pelaku UMKM di Pemprov DKI, dari tahun 2014 sampai tahun 2020 jumlahnya mengalami kenaikan, dari tahun ke tahun. Pelaku UMKM tahun 2014 sebanyak 1.336 orang

dengan berbagai jenis usaha, dan pada tahun 2020 telah mencapai sebanyak 4.058 orang, sehingga jumlah tersebut mengalami kenaikan sebanyak 300 % atau 3 kali lipat, angka ini diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan, meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan para pelaku UMKM sendiri.



Beberapa pelaku UMKM yang terdata di Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, mulai dari berjualan bakso, somay, warteg, sosis, gorengan dan aneka ragam minuman.



UMKM berjualan berbagai minuman dari the, kopi sampai minuman dari beraneka saset jenis minuman segar dan juga aneka gorengan, yang sering disebut Angkringan atau Wedangan.



UMKM berjualan makanan seperti Warteg dan aneka makanan Sosis seperti Sate Taichan.

Pemprov DKI optimistis dengan target pencapaian 200.000 wirausaha pada tahun 2022. Jakpreneur telah hadir melalui sejumlah kegiatan, yakni ruang konsultasi di seluruh Kecamatan, pelatihan bersama ±70.000 anggota, permodalan terhadap lebih dari 800 anggota yang mengajukan, izin terhadap ±24.000 anggota. Kerja sama dan kolaborasi bersama tech partners (Gojek, Grab, Tokopedia, Bukalapak, Shopee), universitas-universitas di Jakarta melalui LLDIKTI, pengusaha besar, hingga berbagai komunitas dan asosiasi. Dengan penyempurnaan program Jakpreneur ini, diharapkan UMKM di Jakarta dapat semakin produktif, berdaya saing, dan berkualitas dan terfasilitasi dalam ruang kota.

Beberapa kolaborasi yang saat ini sudah terjalin dalam program Jakpreneur, di antaranya:

1. Shopee: pelatihan dan pembinaan berkelanjutan untuk transaksi via online,
2. Gojek: pelatihan, kolaborasi dalam acara pemasaran, dan digital payment,
3. Bukalapak: pelatihan, training untuk para pendamping, dan melalui komunitas Bukalapak
4. Grab: perluasan pemasaran dan digital payment,
5. Tokopedia: pelatihan, training untuk para pendamping, dan pemasaran produk,
6. Bearbox: kerja sama pemasaran dan co-retailing produk binaan,
7. Bank Indonesia: edukasi pencatatan / laporan keuangan serta kesempatan pemasaran di luar negeri,
8. Otoritas Jasa Keuangan: fasilitasi untuk Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dan mendorong industri jasa keuangan untuk memberikan permodalan bagi binaan,
9. LLDIKTI (Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi) Wilayah III – Jakarta: penyelenggaraan pelatihan dan pendampingan bagi binaan, serta koordinator untuk kerja sama dengan perguruan tinggi lainnya di wilayah DKI Jakarta

DISKUSI

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dharma Bumiputera, Jakarta telah dipercaya oleh Disperindagkop dan UKM Pemprov DKI Jakarta untuk membantu para UMKM, di Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan untuk mendata para pelaku UMKM.

Adapun data dari beberapa UMKM yang terhimpun meliputi; Nama Pelaku UMKM, NIK, Alamat, Jenis Usaha, Alamat Usaha dan Nomor HP. Jumlah UMKM yang terdata sebanyak 216 pelaku UMKM yang bearad di Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Jumlah UMKM yang nantinya akan mendapatkan Pengembangan kewirausahaan terpadu (PKT) ini diharapkan memiliki manfaat, terutama untuk pengembangan pelaku wirausaha di Pemprov DKI Jakarta, antara lain :

- a) pengembangan kewirausahaan terpadu,
- b) pelatihan pengembangan kewirausahaan terpadu,
- c) pendampingan kewirausahaan terpadu,
- d) pengurusan izin kewirausahaan terpadu,
- e) pemasaran kewirausahaan terpadu,
- f) pelaporan keuangan kewirausahaan terpadu,
- g) penelitian kewirausahaan terpadu, dan
- h) pengabdian kepada masyarakat kewirausahaan terpadu.

Selama Pandemi Covid 19, agar para UMKM di Indonesia, khususnya di Pemprov DKI Jakarta, maka Disperindagkop dan UKM Pemprov DKI Jakarta akan membantu para UMKM di Pemprov DKI Jakarta dalam bentuk memberikan bantuan penambahan modal usaha kepada para pelaku UMKM di Pemprov DKI Jakarta.

Sebanyak 216 data UMKM di Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan yang telah berhasil dikumpulkan selama 3 bulan (Bulan Juli 2020 sampai September 2020) oleh Team STIE Dharma Bumiputera, Jakarta, dimana data UMKM ini nantinya diusahakan akan mendapatkan bantuan penambahan modal usaha sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

Bantuan fiskal untuk UMKM tersebut akan dialokasikan untuk enam kegiatan, yakni subsidi bunga sebesar Rp35,28 triliun, penempatan dana untuk restrukturisasi sebesar Rp78,78 triliun, belanja imbal jasa penjaminan (IJP) sebesar Rp5 triliun, PPh final UMKM ditanggung pemerintah (DTP) sebesar Rp2,4 triliun, serta pembiayaan investasi kepada koperasi melalui

Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB KUMKM) sebesar Rp1 triliun rupiah (Kompas, 2 September 2020).

Jenis Bantuan Program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk UMKM (Rp) (1). Subsidi Bunga 35,28 triliun (2). Penempatan Dana untuk Restrukturisasi Kredit 78,78 triliun (3). Belanja Imbal Jasa Penjaminan 5 triliun (4). Penjaminan untuk Modal Kerja 1 triliun (5). PPh Final Ditanggung Pemerintah 2,4 triliun (6). Pembiayaan Investasi kepada Koperasi melalui LDPB 1 triliun Total 123,47 triliun.

Target PKT adalah terciptanya wirausaha baru sesuai dengan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah. Sasaran PKT adalah bagi wirausaha pemula dan wirausaha naik kelas dan pencari kerja. Para UMKM akan mendapat manfaat yang ada.

Pendaftaran, sebagai syarat untuk bergabung ke program Jakpreneur dan manfaat yang diperoleh pelaku UMKM dalam konsep 7 P, yaitu:

1. Pelatihan, Jakpreneur akan memberi pelatihan: dasar dan tingkat lanjutan itu meliputi: Pelatihan teknis dan Pelatihan non teknis.
2. Pendampingan, nantinya para pelaku usaha atau binaan akan mendapat pendampingan dalam melakukan: memberikan ide-ide kreatif, laporan keuangan, Pemasaran, melakukan perubahan pola pikir kewirausahaan, permodalan.
3. Perizinan, para binaan atau pelaku usaha akan terfasilitas meliputi; nonperizinannya dan perizinan dan dapat dilakukan kolektif atau perindividual.
4. Pemasaran, Perangkat Daerah Penyelenggara Jakpreneur secara mandiri dalam 1 tahun melalui penyelenggaraan pameran wirausaha dilakukan 12 kali.
5. Pelaporan Keuangan dan Fasilitas, pada pelaporan keuangan usaha berbentuk aplikasi pelaporan keuangan.
6. Permodalan, yaitu membantu pelaku UMKM mendapatkan permodalan dan memudahkan pemenuhan persyaratan akses permodalan.

KESIMPULAN

Manfaat dari kolaboratif pengembangan kewirausahaan terpadu (PKT) mencakup konsep 7P, yaitu : (a). pendaftaran, (b). pelatihan, (c). pendampingan, (d). perizinan, (e). Pemasaran, (f), pelaporan dan (g). permodalan. Manfaat UMKM ini tidak serta merta atau secara langsung dapat dinikmati, tetapi melalui beberapa tahapan yang membutuhkan waktu di dalam proses pencapaiannya.

DAFTAR REFERENSI

- Aditya, D. (2020, November 22). *Urgensi Digitalisasi UMKM*. Retrieved Juli 29, 2021, from <https://mediaindonesia.com/opini/363003/urgensi-digitalisasi-umkm>
- Alma, Buchari. (2011). *Kewirausahaan*, Alfabeta: Bandung. Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Andreas, D. (2018, Oktober 18). *Anies Teken Pergub Sebagai Payung Hukum Program OK OCE*. Retrieved Juli 29, 2021, from <https://tirto.id/anies-teken-pergub-sebagai-payung-hukum-program-ok-oce-c7x6>
- Anoraga, Pandji, dan Sudantoko, Djoko. (2012). *Koperasi, Kewirausahaan, dan Usaha Kecil*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik (BPS) (2021) Indonesia.
- Bappeda Provinsi DKI Jakarta. (2018).
- BPS Provinsi DKI Jakarta. (2020, November).
- Chaniago. (2002). *Strategi Memajukan Usaha Kecil dan Menengah*. Pustaka: Jakarta.

Disperindagkop dan UKM Pemprov DKI Jakarta (2021) Pemprov DKI, Jakarta.

Emzir, (2015), *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Faidati, N., & Mutmainah, N. F. (2019). Collaborative Governance Dalam Pengembangan UMKM di Era Revolusi Industri. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*.

Fatimah & Darna. (2011), Peranan Koperasi Dalam Mendukung Permodalan Usaha Kecil Dan Mikro (UKM). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 10(2), 127-138.

Friastuti, R. (2020, Januari 6). *Pemprov DKI Luncurkan Pasar Online E-Order, Gandeng UMKM dan BUMD*. Retrieved from <https://kumparan.com/kumparannews/pemprov-dki-luncurkan-pasar-online-e-order-gandeng-umkm-dan-bumd-1saXtLGkFz2/full>

Hery Wibowo dan Soni A. nulhaqim, (2015). *Kewirausahaan Sosial: merevolusi pola pikir menginisiasi mitra pembangunan*. Bandung: Unpad Press

Jakpreneur Jakarta. (2021). *Pertanyaan yang Sering Diajukan*. Retrieved from <https://jakpreneur.jakarta.go.id/FAQ>

Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi DKI Jakarta Agustus 2020: Dampak Covid-19 Pengangguran DKI Jakarta Tembus Dua Digit. Retrieved from <https://jakarta.bps.go.id/publication/2021/04/21/66cfa3fa680f1a2a2b0f2ab9/keadaan-angkatan-kerja-provinsi-dki-jakarta-agustus-2020.html>

Kemenko-UKM. (n.d). *Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2018-2019*. Retrieved from https://www.kemenkopukm.go.id/uploads/laporan/1617162002_SANDINGAN_DATA_UMKM_2018-2019.pdf

Kewirausahaan Terpadu. Jakarta: (2018). Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 tahun 2020 tentang Pengembangan

Koran Kompas 2 September 2020.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) (2021). “DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DKI JAKARTA.

Laporan Utama: Jakpreneur Programnya Sejahtera Warganya. Retrieved from https://jakita.jakarta.go.id/media/download/ind/edisi_3_2020.pdf

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, (2008), *Analisis Kebijakan Publik Modul Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III.* Jakarta: LAN

Media Indonesia. (2020, September 16). *Bank DKI Kucurkan Kredit ke UMKM Jakpreneur.* Retrieved from <https://mediaindonesia.com/ekonomi/345230/bank-dki-kucurkan-kredit-ke-umkm-jakpreneur>

MONAS: Jurnal Inovasi Aparatur Vol 3 No 2 (2021): 309-320

Nasir, Moh. (2009). *Metode Penelitian.* Bogor: Ghalia Indonesia.

Nawawi, (1983). *Metodologi Penelitian Bidang Sosial.* Yogyakarta: Gajah Mada University Press

Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches.* Essex: Pearson Education.

Potensi Usaha Mikro Kecil Provinsi DKI Jakarta. Retrieved from Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta: <https://jakarta.bps.go.id/publication/2018/12/31/77fd4d04e42bb0d131ff2baf/potensi-usaha-mikro-kecil-provinsi-dki-jakarta.html>

Rencana Pembangunan Jangka Mengah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017- 2022. Retrieved November 28, 2021, from [file:///C:/Users/sasal/Downloads/Knowledge_BAPPEDA_RPJMD%202017-2022%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/sasal/Downloads/Knowledge_BAPPEDA_RPJMD%202017-2022%20(1).pdf)

RENSTRA (2020). "DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Saiman Leonardus, (2009). *Kewirausahaan: Teori, praktik, dan kasus-kasus*. Jakarta: Salemba Empat

Saputri, M. (2019, Oktober 16). *Program OK OCE Warisan Sandiaga Uno Ganti Nama & Makin Diperluas*. Retrieved from <https://tirto.id/program-ok-oce-warisan-sandiaga-uno-ganti-nama-makin-diperluas-ejPf>

Satori, Djam'an dan Aan Komariah, (2015) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.

Subandi. (2007). *Peran Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Pelaku Usaha Dalam Pengembangan UMKM Manik-Manik Kaca di Kabupaten Jombang*. Palembang: Univerdsita Airlangga.

Subarsono, (2013). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta. Sutarto, Sri Edi. 2005. *Koperasi: Nilai-Tambah Ekonomi, Nilai-Tambah Sosial Kultural. Sokoguru Perekonomian*. Jakarta: Penerbit Yayasan Hatta.

Sulaeman. (2014). Analisis Peranan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Dalam Upaya Pengembangan UMKM Di Kabupaten Malang. *Jurnal Modernisasi*, 5(3), 68-89.

Undang- Undang No. 20 Tahun (2008). Tentang UMKM Undang Undang No. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Widiyanti, Ninik. 2016. *Manajemen Koperasi*. Jakarta: Rineka Cipta.